

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelebagaan partai yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada kurun waktu 2019 hingga 2024 melalui integrasi analisis dari konsep pelebagaan partai yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh serta teori tiga wajah partai politik yang diutarakan oleh Katz dan Mair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pola pelebagaan partai yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan gejala utama yakni sentralisasi kekuasaan yang sangat terpusat pada Wajah Partai di Tingkat Pusat (DPP Partai) melalui figur Megawati Sukarnoputri yang mengakibatkan ruang otonomi wajah partai di dua tingkat lain menjadi sempit dan menimbulkan konflik sehingga mesin organisasi tidak mampu berjalan optimal dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024.

Melalui matriks analisis gabungan pelebagaan partai politik yang disusun oleh penulis, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan substantif. *Pertama*, Wajah Partai di Tingkat Pusat merupakan wajah partai yang memiliki taraf pelebagaan dominan dalam keseluruhan struktur organisasi PDI Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri berhasil membangun dan mereproduksi identitas ideologis berbasis nilai Pancasila 1 Juni 1945, Marhaenisme, dan Trisakti secara konsisten ke seluruh jenjang kaderisasi. Model sentralisasi yang dibangun atas basis ideologis dan historis di tubuh PDI Perjuangan terbukti efektif dalam menjaga otonomi organisasi dan meredam konflik internal sehingga pada aspek kohesi internal tidak berujung pada dualisme kepengurusan. Namun, ketergantungan yang sangat besar pada figur Megawati Sukarnoputri sebagai perekat ideologi partai dan pengambil keputusan tunggal mencerminkan proses depersonalisasi partai politik pada PDI Perjuangan belum tuntas, sebuah kelemahan struktural yang berpotensi menimbulkan krisis kepemimpinan pasca transisi ketua umum di masa yang akan datang.

Kedua, Wajah Partai di Jabatan Publik merupakan wajah partai dengan taraf pelebagaan paling rendah dan menjadi sumber utama turbulensi politik di tubuh PDI

Perjuangan selama kurun waktu 2019 hingga 2024. Konstruksi normatif “petugas partai” yang secara formal diatur dalam AD/ART PDI Perjuangan gagal ditegakkan secara konsisten ketika berhadapan dengan logika pragmatis kekuasaan para pejabat publik dari partai ini (terutama eksekutif). Sempitnya ruang otonomi akibat dominasi DPP PDI Perjuangan dan Megawati Sukarnoputri menimbulkan konsekuensi kecenderungan atau potensi kader mengembangkan basis kekuasaan non-kepartaian seperti jaringan relawan serta perilaku mendukung calon dari partai lain atau bahkan maju kontestasi melalui partai lain, yang pada akhirnya menciptakan gesekan antar wajah partai dan berujung pada pembelotan massal menjelang Pemilihan Umum tahun 2024. Di sisi lain, beberapa produk kebijakan yang dihasilkan melalui kolaborasi kader PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif—seperti UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK, dan Revisi UU KUHP—dinilai bertentangan dengan fondasi ideologis partai dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap citra kader PDI Perjuangan di jabatan publik.

Ketiga, Wajah Partai di Akar Rumput memiliki taraf pelembagaan menengah yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, PDI Perjuangan memiliki perangkat jaringan struktural yang sangat masif melalui kehadiran 38 DPD dan 514 DPC di seluruh Indonesia beserta keberagaman organisasi sayap yang mampu menjangkau berbagai segmen sosial. Pendekatan kultural melalui perayaan Bulan Bung Karno, Haul Bung Karno, serta penanaman ideologi dan ketokohan Sukarno pada *platform* lain berhasil mempertahankan basis massa tradisional partai. Namun, sentralisasi kekuasaan oleh DPP PDI Perjuangan dan Megawati Sukarnoputri turut menyumbang faktor penyebab sempitnya ruang otonomi struktur partai pada tingkat lokal sehingga menimbulkan beberapa konflik dan menjadi hambatan dalam beradaptasi terhadap dinamika politik daerah.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran dan rekomendasi strategis bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melakukan pelembagaan partai. Adapun beberapa saran dan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Pertama*, PDI Perjuangan perlu untuk segera mempersiapkan regenerasi kepemimpinan partai dan memulai proses depersonalisasi partai secara

terencana agar keberlangsungan institusional partai tidak sepenuhnya bergantung pada satu figur. Dalam hal ini, capaian sentralitas kekuasaan berbasis nilai ideologis dan historis pada Megawati Sukarnoputri perlu ditinjau agar kerangka ideologis yang sudah menjadi dasar kohesi partai menjadi faktor utama terlepas figur yang menjadi pimpinan partai. Selain itu DPP PDI Perjuangan di masa mendatang perlu bertransformasi dengan memperkuat kapasitas kolektifnya sebagai badan kolegal, bukan hanya sekadar perpanjangan tangan dari ketua umum.

2. *Kedua*, perlu dilakukan suatu upaya reformasi mekanisme kandidasi yang lebih deliberatif dan transparan dengan memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi struktur DPD atau DPC pada berbagai tingkatan elektoral. Model sentralisasi kekuasaan pada aspek kandidasi yang mengamanatkan hak prerogatif ketua umum sebagai faktor utama pengambilan keputusan terbukti rentan terhadap gejala politik yang berdampak pada kinerja organisasi.
3. *Ketiga*, PDI Perjuangan perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas kader di jabatan publik agar terdapat jembatan yang lebih kuat antara agenda ideologis partai dengan produk kebijakan yang dihasilkan. Penting bagi partai untuk melakukan reorientasi dan refleksi strategis atas tujuan penempatan kader di jabatan publik, khususnya untuk memastikan konsistensi implementasi nilai ideologi partai serta relasi antara partai dan kader yang menduduki posisi jabatan publik.

5.2.2 Saran Teoritis.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 2019 hingga 2024 melalui pendekatan konsep pelembagaan partai politik oleh Basedau dan Stroh serta teori tiga wajah partai politik dari Katz dan Mair, penelitian ini memberikan sejumlah implikasi teoritis yang dapat menjadi bahan pengembangan studi partai politik di Indonesia.

1. *Pertama*, penelitian ini menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik tidak dapat dipahami secara linear dan tunggal hanya melalui indikator organisasi formal, elektoral, atau ideologi semata. Penggabungan dimensi pelembagaan partai politik oleh Basedau dan Stroh dengan teori tiga wajah partai oleh Katz

dan Mair membuktikan bahwa pelebagaan partai merupakan proses multidimensional yang berlangsung secara simultan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model analisis integratif yang mampu menjelaskan keterkaitan dimensi pelebagaan partai secara lebih dinamis, khususnya dalam konteks demokrasi di negara berkembang.

2. *Kedua*, penelitian ini memperlihatkan bahwa kuatnya personalisasi pada figur Megawati Sukarnoputri hadir sebagai faktor yang secara simultan memperkuat sekaligus membatasi pelebagaan PDI Perjuangan. Di satu sisi, karisma Megawati Sukarnoputri sebagai pewaris trah Sukarno menjadi perekat ideologis yang efektif. Di sisi lain, ketergantungan institusional yang berlebihan pada satu figur menghambat berkembangnya mekanisme pengambilan keputusan yang deliberatif. Dengan demikian, penelitian ini mendorong perlunya pengembangan teori pelebagaan partai politik yang lebih kontekstual terhadap karakteristik sistem politik di Asia Tenggara, khususnya terkait hubungan antara personalisasi partai politik, karisma kepemimpinan, dan ketahanan organisasi partai.